



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

Sebagai upaya untuk menilai konten media yang dapat memengaruhi sikap politik warga negara, aspek pendidikan publik dapat dijadikan cara untuk melihat sejauh mana media sadar akan peran dan fungsinya dalam mendidik publik. Media yang tidak hanya sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga memastikan konten yang disampaikan bersifat pedagog dapat dilihat sebagai pers yang ideal. Hal ini bertujuan untuk memastikan partisipasi politik yang terjadi dapat dipertanggungjawabkan dan bersikap konstruktif. Aspek pendidikan publik dalam penelitian ini digali secara implisit dengan menggunakan metode analisis naratif dengan hasil sebagai berikut.

1. Cara *tirto.id* menjelaskan omnibus law

Berdasarkan hasil analisis naratif, *tirto* menjalankan aspek pendidikan publik dengan lebih banyak menonjolkan konflik (masalah) yang terjadi dan mempertanyakan masalah yang muncul melalui tanggapan narasumber serta mengikutsertakan bagian dari omnibus law yang dimaksud. *Tirto* banyak menampilkan informasi mengenai omnibus law dengan membahas argumentasi masyarakat sipil yang menolak omnibus law, membahas isi omnibus law yang dinilai bermasalah, mengikutsertakan isi pasal bermasalah dan UU yang dimaksud, menampilkan respon pemerintah terhadap kritik masyarakat, serta informasi latar

belakang mengenai omnibus law (misal, hierarki perundang-undangan, pendapat peneliti, atau pendapat yayasan hukum). Selain itu, *tirto* cenderung terlebih dahulu menampilkan informasi yang membahas gangguan (konflik) sebelum membahas narasi dari narasumber yang menolak atau menyetujui pembahasan omnibus law diteruskan. Dari sini, penulis melihat *tirto* menampilkan aspek pendidikan publik dengan baik karena objektifnya ditekankan untuk memberikan pemahaman bagi publik mengenai masalah yang ditimbulkan oleh Omnibus Law Cipta Kerja sebelum disahkan oleh pemerintah.

2. Cara *tirto.id* menarasikan narasumber

Berdasarkan hasil analisis naratif tokoh dan karakter, *tirto* menampilkan narasumber dari pemerintah sebagai penjahat (pihak yang membuat konflik) dan narasumber dari masyarakat sipil sebagai pahlawan (pihak yang menentang konflik). Hal ini terlihat dari cara *tirto* menempatkan pemerintah sebagai pihak yang menimbulkan konflik dengan membahas hal-hal seperti kesalahan isi di omnibus law, tidak melibatkan serikat buruh, melanggar praktik pemalsuan, dan risiko memperburuk praktik PHK yang diiringi dengan respon pemerintah yang dikritik *tirto* mengentengkan kesalahan dan tidak sinkron.

Di lain sisi, *tirto* menampilkan masyarakat sipil sebagai pahlawan yang berusaha menentang konflik dengan memberikan ruang untuk menjelaskan alasan menolak omnibus law (seperti menyalahi hierarki perundang-undangan, dianggap tergesa-gesa untuk disahkan), menjabarkan perlakuan pemerintah yang terkesan tidak ingin melibatkan masyarakat (undangan rapat dadakan, memalsukan keterlibatan Serikat Buruh dalam proses perancangan Ketenagakerjaan), jawaban

narasumber yang menjelaskan pemerintah pernah melakukan kesalahan yang sama di UU KPK, dan argumentasi dampak buruk jika omnibus law disahkan (praktik pemlasuan langgeng, praktik PHK akan bertambah parah, omnibus law menyalahi hierarki perundang-undangan).

3. Cara *tirto.id* menampilkan konflik dan drama

Dilihat dari hasil analisis naratif, *tirto* menampilkan konflik dan drama melalui tanggapan narasumber yang memiliki sudut pandang berbeda. Sebagai nilai berita, konflik dan drama ini berkaitan erat dengan latar belakang narasumber yang berasal dari pemerintah atau masyarakat sipil. Hal ini dikarenakan dari sampel yang dianalisis, penulis melihat pemerintah adalah pihak yang mendukung omnibus law untuk terus dibahas sementara masyarakat sipil adalah kelompok yang menginginkan pembahasan omnibus law berhenti dilakukan. Meskipun konflik dan drama ini hadir, penulis melihat upaya *tirto* di setiap sampel artikel untuk mengembalikan fokus pembaca kembali ke masalah seungguhnya, yakni kritik mengenai substansi omnibus law yang mencakup bidang ketenagakerjaan, pendidikan, hierarki perundang-undangan, dan respon pemerintah dalam menanggapi penolakan atau kritik dari masyarakat.

5.2 SARAN

5.2.1 Saran Akademis

Untuk penelitian selanjutnya yang ingin menggunakan metode analisis naratif, penulis menyarankan agar peneliti memilih sampel berita investigasi yang peristiwanya telah selesai. Berita investigasi akan memberikan teks yang lebih

lengkap sehingga akan mempermudah proses mencari oposisi biner dan akan memiliki struktur narasi yang lengkap. Ketika menggunakan sampel pemberitaan mengenai omnibus law yang masih berlangsung ketika penelitian ini dilakukan, penulis merasakan hasil penelitian kurang menyuluruh dalam menganalisis teks berita karena struktur narasinya tidak lengkap. Terlebih, teks berita *tirto* tergolong ringkas dalam menyampaikan informasi.

Selain itu, jika penelitian selanjutnya ingin menggunakan konsep pendidikan publik di ranah politik yang berhubungan dengan partisipasi warga negara, maka penulis menyarankan untuk melakukan wawancara dengan pembaca media yang ingin diteliti sebagai data tambahan. Hal ini dikarenakan jurnal penelitian terdahulu yang membahas partisipasi warga negara dan hubungannya dengan konsumsi media—sejauh yang penulis temukan—dilakukan di Amerika Utara yang situasi politiknya berbeda dengan Indonesia.

5.2.2 Saran Praktis

Media memiliki peran penting dalam mendorong partisipasi warga negara untuk sadar akan hak dan kewajibannya. Berdasarkan hasil penelitian penulis, *tirto* telah menunjukkan bahwa isi berita yang diproduksi memiliki aspek pendidikan publik yang baik. Untuk ke depannya, penulis mengharapkan *tirto* sebagai pedagog publik tidak hanya menyajikan informasi yang mendidik, tetapi juga mendorong partisipasi pembacanya untuk aktif secara politik terutama dalam proses pembahasan kebijakan publik untuk menjadi warga negara yang kritis, konstruktif, dan bijak.